

ABSTRAK

Pekerja migran Indonesia (PMI) telah menjadi penyokong ekonomi nasional dengan kontribusi remitan yang tinggi. Namun, ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI, seperti berangkat secara non prosedural, kekurangan dokumen, gaji tidak sesuai janji, dan tindakan kekerasan dari majikan. Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu wilayah dengan warganya yang banyak menjadi PMI dan berangkat secara non prosedural melalui tekong/calor sehingga mengalami masalah karena penempatannya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Sehingga terdapat dua rumusan masalah yang akan peneliti kaji, yang pertama bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan dan kedua bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja migran bermasalah di Kabupaten Pamekasan. Adapun tujuan adanya penelitian ini untuk menganalisa dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran bermasalah serta tanggung jawab pemerintah di Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan, dengan melalui Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan telaah kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini *pertama* pemerintah Kabupaten Pamekasan memberikan perlindungan hukum kepada PMI sesuai dengan proses penempatannya karena perlindungan hukum dapat diberikan apabila penempatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk yang berangkat secara non prosedural pemerintah memberikan perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia yakni mengacu pada hak asasi manusia, kedua tanggung jawab pemerintah terhadap PMI bermasalah telah terlaksana namun belum secara optimal. Sehingga deng itu perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada para PMI dan tekong/calor yang terlibat dalam proses penempatannya dan perlu adanya pembaharuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan yang mengacu kepada undang-undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran, Non Prosedural.

ABSTRACT

Indonesian migrant workers (PMI) have become supporters of the national economy with high remittance contributions. However, there are various problems faced by PMI, such as non-procedural departures, lack of documents, salaries not according to promises, and acts of violence from employers. Pamekasan Regency, as one of the regions with many residents who are PMI and leave non-procedurally through tekong/brokers, is experiencing problems because their placement is not in accordance with the law. So there are two problem formulations that researchers will study, the first is how to implement legal protection for problematic migrant workers in Pamekasan Regency and the second is how the government responsibilities towards problematic migrant workers in Pamekasan Regency. The aim of this research is to analyze and understand the implementation of legal protection for problematic migrant workers as well as the government's responsibilities in Pamekasan Regency.

The type of research used is empirical law with a factual approach, located in Pamekasan Regency, with data collection techniques using interviews and literature study.

The results of this research, firstly, the Pamekasan Regency Government provides legal protection to PMI in accordance with the placement process because legal protection can be provided if the placement is in accordance with statutory regulations, while for those who depart non-procedurally the government provides legal protection as Indonesian citizens, namely guided by right. human rights, both the government's responsibility towards problematic PMI have been implemented but not optimally. So there needs to be supervision carried out by the government on PMI and tekong/brokers involved in the placement process and there needs to be an update to the Regional Regulations of Pamekasan Regency which refers to the new law, namely Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

Keywords: Legal Protection, Migrant Workers, Non-Procedural.